

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa strategi peningkatan bela negara untuk memperkuat pertahanan negara era globalisasi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur memiliki relevansi terhadap upaya terwujudnya wilayah pertahanan yang mampu mewujudkan strategi pertahanan rakyat semesta dan diwujudkan dari partisipasi masyarakat Ponorogo yang ikut serta bela negara dalam bentuk nyata di era tantangan globalisasi dan didukung oleh Pemkab Ponorogo dalam perkuatan pertahanan negara. Strategi peningkatan bela negara oleh Pemkab Ponorogo di era globalisasi ini diantaranya dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bekerja dan melakukan hal yang produktif dan mengimplemetasikan bela negara dalam kehidupan sehari hari karena wilayah Ponorogo didukung dalam produktifitas masyarakat yang tinggi dapat dijadikan sumber daya untuk meningkatkan pertahanan negara melalui kehidupan berbangsa dan bernegara dan mendorong masyarakat terus melakukan pembangunan strategis bangsa dan Negara.

5.1.1 Strategi Peningkatan Bela Negara di Wilayah Ponorogo Oleh Pemda Ponrogo

Strategi yang diterapkan oleh Pemkab Ponorogo dapat dikelompokan dalam nilai nilai bela negara yaitu sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan bela negara melalui langkah produktif sebagai bagian cinta tanah air dan pembangunan situs bersejarah dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air;

2. Strategi Peningkatan Sadar Berbangsa dan Bernegara dengan melestarikan dan menhidupkan kesenian Reog Ponorogo sebagai Kesenian asli daerah Ponorogo;
3. Pembangunan Sikap Setia kepada Pancasila dengan mewujudkan apartur pemerintahan yang mempunyai integritas yang tinggi pada pelayanan terhadap masyarakat;
4. Membangun sikap Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara dengan melakukan gotong royong dan saling menghargai antar umat beragama dan menjunjung tinggi budaya berkumpul;
5. Membangun Kemampuan Awal Bela Negara dengan berkolaborasi dengan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) membentuk kader-kader dari kalangan pendidikan yang mengikuti pelatihan bela negara.

5.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Ponorogo Ikut Serta Bela Negara Dalam Bentuk Nyata Di Era Tantangan Globalisasi

Dalam partisipasi bela negara banyak hal yang dikembangkan oleh Pemkab Ponorogo, salah satunya yaitu Budaya gotong royong juga dirawat dan dipelihara oleh masyarakat Ponorogo yang biasa dilakukan ketika masyarakat membangun dan memperbaiki fasilitas umum, misalnya jalan, saluran irigasi, kebersihan lingkungan. Keberhasilan Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung program pemerintah pusat yang salah satunya yaitu pertahanan negara yaitu dapat diukur dan dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik yang ada dengan melakukan program kerja yang melibatkan Forkopimda yaitu Kodim, Polres, DPRD, Kejaksaan dan elemen masyarakat lainnya. Kemampuan pemerintah daerah menuntaskan permasalahan yang dikeluhkan publik memberikan dampak positif terhadap penilaian kinerja dalam wujud apresiasi dan kepuasan masyarakat. Menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan publik, sehingga dapat merumuskan dan

melaksanakan kebijakan yang tepat serta akurat. Pemerintah daerah memiliki kepekaan terhadap isu-isu strategis yang berpotensi menjadi keuntungan (benefit) sekaligus permasalahan di masa yang akan datang. Isu-isu tersebut dapat bersifat lokal di tingkat daerah yang bersangkutan, atau isu yang menjadi pembahasan strategis di tingkatan provinsi, nasional hingga internasional. Dinamika yang terjadi di beberapa lingkungan kebijakan tersebut dapat diantisipasi, sehingga mampu berdampak positif terhadap kesadaran bela negara di wilayah Ponorogo serta ikut serta dalam pembangunan daerah.

Peran yang ditunjukkan masyarakat yang aktif mendata di aplikasi buatan Pemkab Ponorogo melalui Bakesbangpol yang tercatat resmi ada 226 ormas/LSM menjadi penangkal dinamika dan problematika di lingkungan pemerintah daerah diantisipasi dengan mengkaji dokumen-dokumen perencanaan pembangunan terkait dan berpengaruh terhadap daerah tersebut yang mewujudkan ketepatan dalam menentukan strategi yang mempengaruhi *positioning* pemerintah daerah bersangkutan dengan peningkatan bela negara dan sikap masyarakat untuk ikut serta. Dalam pengamatannya penenliti membagi partisipasi masyarakat ke dalam beberapa kategori dibidang kehidupan sehari hari diantaranya:

1. bidang ideologi yang menunjukkan keikutsertaan pemilih dalam memilih kepala daerah diatas nilai rata rata nasional sebesar 74,1%;
2. politik dan hukum yang menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan yang ikut mengusulkan kebijakan yang ada di daerah;
3. ekonomi yang tumbuh pesat sebesar 3,14% yang merupakan suatu raport yang sangat membanggakan bagi masyarakat Ponorogo yang rata rata PAD dari sektor pertanian perkebunan dan sektor jasa;

4. sosial budaya yang ditunjukkan masyarakat Ponorogo sangat peduli dengan kelestarian seni reog Ponorogo dan selalu mengadakan acara setiap pertengahan bulan purnama di balai desa yang ada di Ponorogo;
5. pertahanan keamanan yang dibentuk pemerintah Ponorogo melalui kerjasama dengan TNI / POLRI di setiap kecamatan dan desa di Ponorogo dan;
6. adanya campur tangan masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.

Dari kategori diatas Masyarakat Ponorogo ikut andil dalam bela negara sesuai potensi dan pekerjaan yang dianut oleh masyarakat Ponorogo yaitu bertani dan menjadikan pertumbuhan ekonomi di Ponorogo semakin meningkat serta ikut melestarikan kesenian Reog yang merupakan bela negara dari ancaman pengakuan budaya oleh negara asing.

5.1.3 Perkuatan Pertahanan Negara Yang Dilakukan Pemda Ponorogo Melalui Bela Negara

Perkuatan pertahanan melalui bela negara yang dilakukan pemda Ponorogo saat ini sangat banyak termasuk melalui program kerja pemda Ponorogo berkolaborasi dengan Forpimda TINI / POLRI serta banyak elemen masyarakat yang secara sukarela ikut bergabung dalam menyukseskan program kerja pemda Ponorogo, sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang menjadi haluan bagi pelaksanaan pemerintahan selama lima tahun dalam penyusunannya memperhatikan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Ponorogo. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Ponorogo dengan RTRW Kabupaten Ponorogo yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang beerlandaskan idiologi pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata” a. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan tentang salah satu misi penataan ruang adalah mewujudkan pengembangan pertanian unggulan dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya”
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Keterkaitan antara RPJMD dan RTRW Pemkab Ponorogo dengan perkuatan bela negara sangat erat karena menentukan arah kebijakan pembangunan dan strategi pertahanan rakyat semesta karena akan melibatkan rancangan anggaran dan rancangan tata ruang dan tata wilayah sebagai dukungan pertahanan daerah pada wilayah Republik Indonesia.

5.2 Saran

Dalam penyusunan naskah tesis ini tentunya masih banyak kekurangan yang ditemukan dan masih adanya data yang sifatnya dapat berubah di masa depan, maka dari itu peneliti memberikan saran dalam kajian penelitian strategi peningkatan bela negara di era globalisasi untuk pertahanan nasional ini , yaitu sebagai berikut

5.2.1 Saran Strategi Peningkatan Bela Negara di Wilayah Ponorogo

Pemkab Ponorogo memiliki memiliki SDM yang sangat layak dan mempuni akan tetapi masih banyak yang belum dimanfaatkan guna mewujudkan pertahanan ideal dan belum terorganisir sampia tingkat pusat oleh sebab itu diharapkan kedepanya ada jalan dan kebijakan yang dapat mewedahi lebih lanjut kaitanya pertahanan rakyat semesta melalui kebijakan daerah yang diselaraskan pemerintah pusat dan di moderenkan dengan cara digitalisasi agar tercapainya pengorganisirian masyarakat jika negara dalam ancaman ataupun dalam kondisi bahaya;

5.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Ponorogo Ikut Serta Bela Negara Dalam Bentuk Nyata Di Era Tantangan Globalisasi

Masyarakat akan lebih baiknya jika dapat lebih mengembangkan peran yang di semua lini kehidupan masing masing agar terciptanya stabilitas wilayah dan Pemerintah dapat memberikan pemahaman pada masyarakat Indonesia secara masif tentang arti bela negara yang dapat dilakukan di wilayah Ponorogo , sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari bela negara serta dapat membantu pembangunan yang ada di Indonesia.

5.2.3 Perkuatan Pertahanan Negara Yang Dilakukan Pemda

Meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan Forpimda (Kodim,PolresKejaksaan,DPRD,dan unsur lainnya) dan mengupdate teknologi dan informasi terbaru guna pertahanan negara yang lebih ideal dan dapat menangkal AGHT yang mungkin akan terjadi di era globalisasi dan digitalisasi sehingga dapat menjadi kekuatan secara digital yang dapat digunakan ketika dibutuhkan.